

**PENYUSUNAN LKPJ PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**1. PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN OPD**

URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	
	SEBELUM PERUBAHAN (RP)	SESUDAH PERUBAHAN (RP)	RP	%
<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</i>	<b>681.909.798</b>	<b>787.806.621</b>	<b>105.896.823</b>	<b>15,5</b>
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	134.520.000	131.130.000	(3.390.000)	<b>(2,5)</b>
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.000.000	20.000.000	(40.000.000)	<b>(66,7)</b>
Administrasi Umum Perangkat Daerah	190.021.798	337.762.621	147.740.823	<b>77,7</b>
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	270.824.000	266.646.000	(4.178.000)	<b>(1,5)</b>
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.544.000	32.268.000	5.724.000	<b>21,6</b>
<i>Program Kesejahteraan Rakyat</i>	<b>8.456.668.635</b>	<b>36.469.970.142</b>	<b>28.013.301.507</b>	<b>331,3</b>

Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	6.950.970.000	14.407.265.000	7.456.295.000	<b>107,3</b>
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	898.975.000	20.528.492.414	19.629.517.414	<b>2.183,5</b>
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	606.723.635	1.534.212.728	927.489.093	<b>152,9</b>

Berdasarkan data-data diatas, ada beberapa hal yang perlu Kami jelaskan terkait perubahan anggaran yang terlihat cukup dan sangat signifikan perubahannya.

#### ***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi***

- Anggaran Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah berkurang sebesar 66,67%. Kami membuat kebijakan pengurangan anggaran pada APBDP 2022 karena sampai dengan bulan Juli 2022 anggaran tersebut tidak ada permohonan Pelatihan Kepegawaian yang diajukan oleh Staf Pegawai Biro Kesejahteraan Rakyat.
- Anggaran Administrasi Umum Perangkat Daerah meningkat sebesar 77,7%. Peningkatan anggaran ini terjadi pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Kebijakan anggaran tersebut untuk mengimbangi peningkatan jumlah penyelesaian Administrasi Pencairan Hibah yang secara nominal anggaran meningkat lebih dari 2.000%.
- Anggaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meningkat sebesar 21,6%. Kami mengambil kebijakan peningkatan anggaran ini karena selama beberapa tahun yang lalu Biro Kesejahteraan Rakyat tidak menganggarkan Pemeliharaan Barang sehingga menyebabkan jumlah asset yang rusak dan tidak dilakukan pemeliharaan semakin meningkat.

#### ***Program Kesejahteraan Rakyat***

**1. Anggaran Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual meningkat sebesar 107,3%.**

Peningkatan anggaran ini terjadi pada sub kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual untuk Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dari APBD 2022 sebesar Rp 1.935.000.000 menjadi Rp 6.070.000.000 pada APBDP 2022 atau meningkat Rp 4.135.000.000.

Peningkatan anggaran juga terjadi pada sub Kegiatan Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual untuk Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dari APBD 2022 sebesar Rp 4.580.000.000 menjadi Rp 7.410.700.000 pada APBDP 2022 atau meningkat Rp 2.830.700.000.

**2. Anggaran Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar meningkat sebesar 2.183 %.**

Peningkatan anggaran yang sangat signifikan ini terjadi pada sub kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan. Anggaran APBD 2022 sebesar Rp. 279.920.000 menjadi Rp 19.403.460.232 pada APBDP 2022.

Penambahan anggaran ini disebabkan karena adanya Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat atau Beasiswa Kaltara Unggul 2022 sebesar Rp. 15 Milyar. Selain itu, kegiatan Beasiswa Kaltara Unggul 2022 juga berdampak pada penambahan anggaran sekitar 50% s.d 466% yang terkait dengan Beasiswa Kaltara Unggul yaitu anggaran Perjalanan Dinas, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan serta Belanja Makanan dan Minuman Rapat.

Selain Sub Kegiatan diatas, Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial dan Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan juga mengalami peningkatan anggaran

**3. Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar meningkat sebesar 152%**

Semua Sub Kegiatan dibawah Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar mengalami kenaikan anggaran antara 52% sampai dengan 309%. Kenaikan ini disebabkan oleh Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

## 2. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan :

### 2.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Tabel Capaian Kinerja berdasarkan Target Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
1.	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran di Unit Kerja Biro Kesra	Persentase kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Pada Unit Biro Kesra)	90%	92,93 %	103,3 %	-	-
2.	Meningkatnya tertib Administrasi Penyusunan Kebijakan dan Pelaksanaan Administrasi / Pembangunan Bidang Bina	Persentase Koordinasi yang Berkaitan dengan Bidang Bina Mental dan Spiritual (Kegiatan)	85%	93,02 %	109,43 %	-	-

	Mental dan Spiritual						
3.	Meningkatnya tertib Administrasi Penyusunan Kebijakan dan Pelaksanaan Administrasi / Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Koordinasi yang Berkaitan dengan Bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar (Kegiatan)	85 %	99,71 %	117,30 %	-	-
4.	Meningkatnya tertib Administrasi Penyusunan Kebijakan dan Pelaksanaan Administrasi / Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase Koordinasi yang Berkaitan dengan Bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar (Kegiatan)	85%	88,13 %	103,68 %	-	-

**2.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.**

Tabel Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap Urusan Pemerintahan/Urusan Penunjang / Urusan Pendukung Pemerintahan sesuai dengan Target dalam Dokumen Anggaran

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROG/KEG	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)			
1.	Penunjang	Biro Kesejahteraan Rakyat	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</i> 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90%	118.017.000	107.7%	127.140.000	1. Realisasi Anggaran TW I 2022 <b>nihil</b> dan berdampak pada honorarium beberapa Pejabat tidak dapat dibayarkan.		
			2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90%	18.000.000	0%	-	1. Pada tahun ini pelatihan peningkatan kapasitas Pegawai yang ditawarkan oleh Lembaga pelatihan belum sesuai dengan kebutuhan peningkatan kinerja di Biro Kesejahteraan Rakyat.	1. Setiap Pegawai memberikan daftar list kebutuhan Pelatihan peningkatan Kapasitas diri (Soft Skill) yang berguna untuk meningkatkan kinerja di Masing-masing Bagian.	

			3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%	303.986.358	86%	262.487.859	1. Beberapa Kegiatan akhir tahun tidak dapat terlaksana sesuai dengan rencana anggaran. Seperti safari natal ke 5 Kabupaten Kota di Provinsi kaltara.		
			2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%	239.981.400	109%	262.766.746			
			3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%	29.041.200	107%	30.967.417	1. Anggaran pemeliharaan asset sangat kecil, sehingga hanya beberapa asset yang dapat dilakukan pemeliharaan.	1. Anggaran pemeliharaan minimal sebesar 20% dari nilai asset yang dikelola oleh OPD	
2.			<b>Program Kesejahteraan Rakyat</b> 1. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	85%	12.246.175.250	108%	13.235.712.259	Beberapa penerima hibah tidak mencairkan dana hibahnya karena beberapa alasan : 1. Tidak dapat memenuhi persyaratan Administrasi pencairan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kaltara. 2. Calon penerima hibah tidak mampu untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban karena	1. Calon penerima hibah harus diberikan edukasi terkait penggunaan dan pelaporan dana hibah melalui kegiatan sosialisasi Peraturan Gubernur dan UU yang terkait dengan	

								keterbatasan waktu realisasi anggaran.	hibah dan bansos.	
			2. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	85%	17.449.218.551	115%	20.125.706.492	1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara hanya menganggarkan bantuan Kesehatan bagi masyarakat yang ingin berobat di luar dari wilayah Provinsi Kalimantan Utara, namun masih banyak masyarakat dari Kabupaten Kota yang memohon bantuan Kesehatan akomodasi ke antar Kabupaten Kota yang merupakan kewajiban dari Pemerintah Kabupaten Kota.	1. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten dalam membuat perencanaan yang lebih baik dalam peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat Kalimantan Utara	
			3. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	85%	1.304.080.818	97%	1.270.451.105	1. Proposal pengajuan bantuan banyak yang tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, sehingga tidak dapat diproses. 2. Calon penerima bantuan fasilitasi kegiatan tidak dapat memberikan bukti Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan sehingga bantuan fasilitasi menjadi terlambat	1. Memberikan edukasi atau sosialisasi kepada calon penerima bantuan mengenai peraturan terkait dengan hibah dan bansos	

									bahkan tidak dapat dicairkan.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--

### 2.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan data realisasi dan Perjanjian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022, maka Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Utara pada telah bekerja sesuai Tupoksi dan dapat melaksanakan tugas pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Provinsi Kalimantan Utara sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2022. Hal ini dapat terlihat dari data realisasi yang berkaitan dengan Program Kesejahteraan Masyarakat Pelayanan Dasar dan Non Dasar telah tercapai diatas target yang telah ditetapkan. Secara persentase tingkat realisasi anggaran tertinggi yaitu pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang mencapai 115% dari target yang telah ditetapkan.

Adapun jumlah Pokok Pikiran (POKIR) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 ini pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar **Rp. 7.029.200.000,-**. Dari jumlah POKIR tersebut yang telah terealisasi pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp6.233.500.000** atau sebesar **88,68%** dan tidak dapat terealisasi sebesar **Rp. 795.700.000,-** atau **11,32%**.

Untuk penyebaran POKIR pada tahun ini pada 5 Kabupaten Kota datanya adalah sbb :

NO	KOTA/KABUPATEN	PERSENTASE (100%)
1	Tarakan	42,53%
2	Nunukan	21,26%
3	Malinau	10,51%

4	Bulungan	24,88
5	KTT	0,80%

### 3. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam format sebagai berikut:

NO.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	BEASISWA UMUM KALTARA UNGGUL PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 188.44/K.900/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TUJUAN DARI KEBIJAKAN INI ADALAH UNTUK MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA SESUAI AMANAT PEMBUKAAN UUD 1945</li> <li>• MEMBERIKAN APRESIASI KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI ATAS PRESTASI AKDEMIKNYA</li> <li>• MEMBANTU KELUARGA YANG TIDAK MAMPU DALAM MENEMPUH PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI.</li> </ul>

2.	BANTUAN AKOMODASI DAN TRANSPORTASI PENGOBATAN BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU/MISKIN TA 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 188.44/K.451/2022</li> <li>2. KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 188.44/K.627/2022</li> <li>3. KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 188.44/K.712/2022</li> <li>4. KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 188.44/K.783/2022</li> <li>5. KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 188.44/K.953/2022</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MENJALANKAN AMANAT UUD 1945 MENGENAI HAK MASYARAKAT UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN SOSIAL DARI PEMERINTAH</li> <li>• MENGURANGI BEBAN KEUANGAN MASYARAKAT DALAM MENDAPATKAN PENGOBATAN YANG TEPAT DAN LAYAK.</li> </ul>
3.	BANTUAN SOSIAL KEPADA INDIVIDU DAN/ ATAU KELUARGA (KORBAN KEBAKARAN)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 188.44/K.563/2022</li> <li>2. KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 188.44/K.58/2022</li> <li>3. KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 188.44/K.592/2022</li> <li>4. KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 188.44/K.718/2022</li> <li>5. KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 188.44/K.792/2022</li> <li>6. KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 188.44/K.886/2022</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MENGURANGI DAMPAK SOSIAL AKIBAT TERJADI BENCANA KEBAKARAN</li> </ul>

4.	PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 188.44/K.431/2022</li> <li>2. KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 188.44/K.562/2022</li> <li>3. KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 188.44/K.873/2022</li> <li>4. KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 188.44/K.784/2022</li> <li>5. KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 188.44/K.340/2022</li> <li>6. KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 188.44/K.687/2022</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MEMBANTU LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PADA BIDANG KEAGAMAAN DAN NON KEAGAMAAN YANG BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN NILAI-NILAI KETUHANAN YANG MAHA ESA DAN PERSATUAN BANGSA MASYARAKAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA.</li> </ul>
----	-----------------------------------	--	---

#### 4. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN ( **NIHIL** )

##### 4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan

Uraian mengenai identifikasi urusan pemerintahan yang menjadi tugas pembantuan

4.1.1 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya

4.1.2 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya

##### 4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Memuat uraian hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan serta upaya penyelesaian pada setiap tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya maupun tugas pembantuan yang diberikan kepada tingkatan pemerintah di bawahnya.

## **5. DOKUMENTASI KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 adalah sbb :